

PERAN INTELIJEN TNI ANGKATAN LAUT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DI LAUT

Ahmad Virgaus*)
ahmvirgaus@gmail.com

(Diterima 22-08-2019, disetujui 18-02-2020)

ABSTRAK

Luasnya wilayah perairan Indonesia dengan lokasi yang strategis serta kekayaan sumber kelautan yang berlimpah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia yang akan berdampak pada semakin meningkatnya potensi berbagai tindak kejahatan/pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan tersebut, maka TNI Angkatan Laut dituntut memiliki intelijen yang berkualitas agar dapat mendukung tugas dan fungsi TNI Angkatan Laut. Personil intelijen TNI Angkatan Laut diharapkan mampu menganalisis, mendeteksi dan memprediksi segala potensi-potensi ancaman di lapangan serta pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana di laut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik melalui metode wawancara dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) agar kedepannya intelijen TNI Angkatan Laut dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan inti dalam pemberantasan tindak pidana di laut.

Kata kunci: Intelijen TNI Angkatan Laut, *Analytical Hierarchy Process* (AHP), *Tindak Pidana di Laut*

ABSTRACT

The extent of Indonesia's territorial waters with its strategic location and the abundance of marine resources is a big task for Indonesia to anticipate the developing crimes at Indonesian waters. To handle the issue, it is a must for TNI AL to have high quality intelligence capabilities to support TNI AL's tasks and roles. TNI AL's intelligence personels must able to analyze, to detect and to predict any potential threats on the field as well as to disclose and to eradicate the criminality on the sea. In order to maximize roles and function of TNI AL as the core unit in combating crime at the sea, this research aims to find the best solution on how to increase TNI AL's intelligence capabilities by using interview and Analytical Hierarchy Process (AHP) methodes.

Keywords: Indonesian Navy Intelligence, Analytical Hierarchy Process (AHP), Crime At The Sea

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak diantaranya dua benua yaitu Asia-Australia dan dua samudera

*) Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke – 57 TP 2019

Indonesia-Samudera Pasifik, bentang laut wilayah 70% lebih luas dibanding dengan luas daratan yang hanya 30%, terdiri dari gugusan pulau yang mencapai lebih dari 17.504 pulau, wilayah daratan dan laut keseluruhannya adalah 5.193.250 km² yang terdiri dari 2.027.170 km² daratan dan 3.166.080 km², keterbatasan energi merupakan penghambat terbesar Indonesia untuk maju, sementara itu pengembangan kekayaan perikanan dan kelautan juga masuk prioritas (AS Hikam, 2014). Dengan besarnya luas wilayah perairan Indonesia serta kekayaan sumber kelautan yang berlimpah, akan berdampak pada semakin meningkatnya potensi berbagai tindak kejahatan/pelanggaran di wilayah perairan Indonesia (Sayidiman: 2019). Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka TNI Angkatan Laut memerlukan pengawak/personil salah satunya di bidang intelijen yang memiliki kemampuan berkualitas agar dapat mendukung tugas TNI Angkatan Laut dalam pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana di laut. Rumusan Masalah pada tulisan ini adalah: bagaimana peran intelijen baik secara mandiri maupun terkoordinasi dengan Stakeholder dalam mendukung operasi dan penerapan sistem deteksi dini dalam pengungkapan segala bentuk potensi ancaman dan tindak pidana di laut?

Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif di mana peneliti sendiri, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, penafsiran data sehingga pada akhirnya menjadi pelapor dari hasil penelitiannya. (Moleong, 2010: 4) Alasan peneliti memilih metode ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan dan menganalisis secara detail mengenai bagaimana peran dan hambatan dari Intelijen TNI Angkatan Laut dalam mendukung pemberantasan tindak pidana di laut mengingat penelitian ini juga menganalitik peran, hambatan dan tantangan dari intelijen TNI Angkatan Laut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda *Analitycal Hierarchy Process* (AHP). AHP adalah suatu model yang luwes yang memungkinkan kita untuk melakukan analisis dan mengambil keputusan dengan cara mengkombinasikan pertimbangan dan nilai pribadi secara logis, dapat menyusun skala baru untuk mengukur sifat-sifat yang telah terjadi (Thomas: 1986).

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Organisasi Intelijen TNI AL

Struktur organisasi TNI Angkatan Laut yang tertuang dalam Pasal 97 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia bahwa “Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut adalah salah satu badan pelaksana pusat yang bertugas di bidang pengamanan”.

2.2. Tindak Pidana Dilaut

Tindak Pidana di Laut yaitu Tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut yang artinya memiliki kekhususan sendiri maka hal tersebut bisa dikategorikan menjadi suatu ancaman. Perspektif ancaman konvensional yang berasal dari dalam dan luar negeri baik yang sudah terjadi maupun potensi yang dapat terjadi, meliputi : peredaran narkoba, pemberontakan yang berujung pada tindakan separatis, terorisme, konflik sosial, konflik teritorial, terutama masalah perbatasan; kejahatan di laut, berupa pembajakan, penyelundupan, *illegal fishing*, *illegal entry*, pelanggaran wilayah baik yang sudah terjadi maupun memiliki potensi yang dapat mengarah pada terjadinya persengketaan (Irawan : 2004).

2.3. Intelijen TNI Angkatan Laut

Istilah Intelijen sendiri berasal dari kata *inteligensia* yang artinya kecerdasan (Saronto: 2004). Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, mengartikan bahwa intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjelaskan

“Intelijen memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi penyelidikan, fungsi pengamanan dan fungsi penggalangan. Dua tindakan utama yang dilakukan intelijen, yakni pengumpulan dan analisa, harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas yakni yang menghubungkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan kebutuhan pembuat keputusan dan penggunaan dari produk intelijen yang sudah rampung. Ini dilakukan melalui konsep siklus intelijen yakni suatu proses dimana informasi didapatkan, diubah menjadi produk intelijen dan dibuat disajikan kepada pembuat kebijakan (Johnson, 2002: 187).

Intelijen Maritim merupakan salah satu bagian dari intelijen TNI yang menitik berat pada aspek laut (Komando Pendidikan Operasi Laut Pusat Pendidikan Intelijen Maritim: 3). Intelijen Maritim mempunyai dimensi yang lebih luas daripada intelijen Angkatan Laut yang meliputi semua aspek maritim yang menyangkut kehidupan politik, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan.

2.4. Teori Kerjasama

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing (Abulsyani: 1994). Aspek koordinasi lintas organisasi intelijen juga merupakan salah satu bentuk kerjasama, sehingga dengan adanya koordinasi antar kesatuan, maka akan terjadi sistem sharing informasi.

2.5. Teori Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan IT dapat dibagi kedalam dua kategori (Chin dan Todd: 1995) yaitu Kemanfaatan dengan estimasi satu factor dan Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor yang dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kemanfaatan dan efektifitas. Apabila pemanfaatan peralatan-peralatan yang jelas, maka akan diperoleh hasil yang maksimal untuk kepentingan operasi intelijen. Dengan demikian sangatlah mutlak diperlukan peralatan khusus teknologi intelijen untuk menunjang kegiatan deteksi dini dalam persiapan operasi intelijen oleh lembaga intelijen kenegaraan.

2.6. Konsep Ancaman

Persepsi ancaman akan selalu berada dalam konsep pertahanan dan keamanan dan TNI Angkatan laut memandang aspek lautpun memiliki ancaman yang perlu diwaspadai, dan ini akan menjadi tugas yang akan diemban TNI Angkatan Laut sebagai inti kekuatan pertahanan negara dilaut yang salah satu tugasnya menegak hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fungsi dari TNI Angkatan Laut adalah :

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman di, dari dan lewat laut;
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan (Keputusan Kasal Nomor KEP/1111/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe).

Penangkalan dilaksanakan dengan dukungan kekuatan Kapal Republik Indonesia (KRI) TNI Angkatan Laut yang merupakan wujud dari pengerahan kekuatan pada daerah-daerah vital dan rawan agar mampu menghalangi ancaman dengan cepat serta upaya dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut dan merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI guna memperkuat postur pertahanan Negara.

3.1. Tataran Kewenangan dan Tanggungjawab Intelijen TNI Angkatan Laut.

Baik di dalam organisasi, aktivitas maupun produk maka perlu adanya kepastian/kejelasan tentang tataran kewenangan dan tanggungjawab oleh berkaitan dengan tugas intelijen untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Laut yaitu: Tingkat Mabes Angkatan Laut (Kasal, Asisten Pengamanan dan Kadispamal) dan Tingkat Kotama dan Kolakops (Panglima Armada, Kadishidros, Danguspur/kamla).

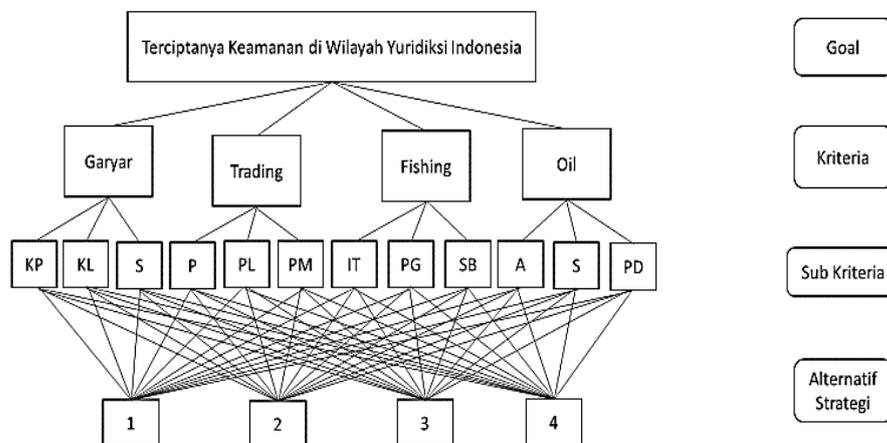
Dalam penelitian ini, alat analisis data menggunakan *Analytic Hierarchy Process (AHP)* dengan bantuan *software Expert Choice 11*. Dalam penggunaannya, AHP mengenal 3 (tiga) prinsip pokok, yaitu: Penyusunan hierarki, Penentuan Prioritas, dan Konsistensi Logis.

Peneliti melaksanakan pengambilan data dari responden dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang mewakili kriteria-kriteria penilaian sebagai ukuran yang mempengaruhi terhadap pemilihan alternatif model terciptanya keamanan.

3.2. Matriks Perbandingan Berpasangan

Penelitian lebih difokuskan pada perumusan suatu model berbasis AHP untuk menilai dari keempat alternatif model terciptanya keamanan yang diusulkan dan kelayakan yang paling baik. Secara mendasar, ada tiga langkah dalam model AHP yaitu membangun hirarki, penilaian dan sintesis prioritas.

- a. Pembentukan hirarki sendiri terbagi dalam 4 level yaitu: Sasaran dari keputusan yang akan diambil dan ditempatkan pada puncak hirarki. Dalam hal ini sasaran yang dimaksud adalah "Tercipta Keamanan di Wilayah Yuridiksi Indonesia, Pada tingkatan kedua, diajukan kriteria-kriteria penilaian dari kewenangan yang dimiliki TNI Angkatan Laut dari alternatif model yang diusulkan. Kriteria-kriteria tersebut terdiri dari Pelanggaran Pelayaran (Garyar), *Illegal Trading*, *Illegal Fishing*, dan *Illegal Oil*, Pada tingkatan ketiga, diajukan sub kriteria penilaian dari kemampuan satuan intelijen yang dimiliki TNI Angkatan Laut dari alternatif kriteria yang diusulkan, dan Pada tingkatan terakhir atau keempat, diusulkan alternatif strategis pada TNI Angkatan Laut.



Gambar 1: Struktur Pemilihan Alternatif Model

b. Matrik Perbandingan Berpasangan.

Tabel 4.1
Matrik Orde 4 x 4 untuk Level 2
(Goal terhadap kriteria)

	Garyar	Trading	Fsihing	Oil
Garyar	A11	A12	A13	A14
Trading	A21	A22	A23	A24
Fishing	A31	A32	A33	A34
Oil	A41	A42	A43	A44

Tabel 4.2.
Matrik Orde 3 x 3 untuk Level 3

	KP	KL	S
KP	A11	A12	A13
KL	A21	A22	A23
S	A31	A32	A33

Tabel 4.3.
Matrik Orde 3 x 3 untuk Level 3

	P	PL	PM
P	A11	A12	A13
PL	A21	A22	A23
PM	A31	A32	A33

Tabel 4.4.
Matrik Orde 3 x 3 untuk Level 3

	IT	PG	SB
IT	A11	A12	A13
PG	A21	A22	A23
SB	A31	A32	A33

Tabel 4.5
 Matrik Orde 3 x 3 untuk Level 3

	A	S	PD
A	A11	A12	A13
S	A21	A22	A23
PD	A31	A32	A33

Tabel 4.6.
 Matrik Orde 4 x 4 untuk Level 4

	1	2	3	4
1	A11	A21	A31	A41
2	A21	A22	A32	A42
3	A31	A23	A33	A43
4	A41	A24	A34	A44

c. Tahap Pembobotan

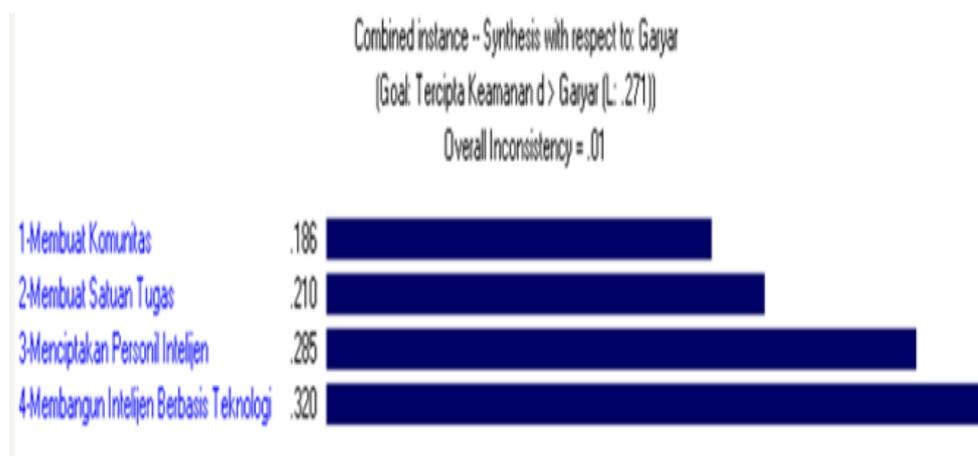
Pengolahan data dalam menentukan goal (tujuan) yaitu terciptanya keamanan di wilayah Yuridiksi Indonesia. Adapun alternatif yang telah ditetapkan terdapat 4 alternatif yaitu: Membuat Komunitas, (2) Membuat Satuan Tugas, (3) Menciptakan Personil Intelijen dan (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi.

Hasil akhir dari pengolahan data berdasarkan metode AHP adalah sebagai berikut :



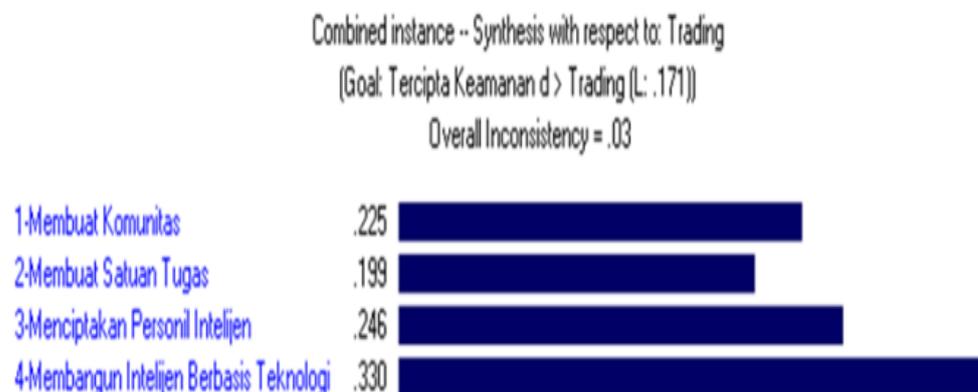
Gambar 2 : Hasil Prioritas Terhadap Alternatif Goal.

Pengolahan data diatas kemudian dapat diperoleh bobot prioritas dari bobot prioritas alternatif terhadap goal yaitu (1) Membuat Komunitas 0,22; (2) Membuat Satuan Tugas 0,19; (3) Menciptakan Personil Intelijen 0.25; (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0,32. Hasil bobot prioritas tertinggi pada alternatif ke (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0.32 dan ratio konsistensi 0,02. Pada sub bab berikutnya hasil pengolahan data dari bobot alternatif terhadap masing-masing kriteria.



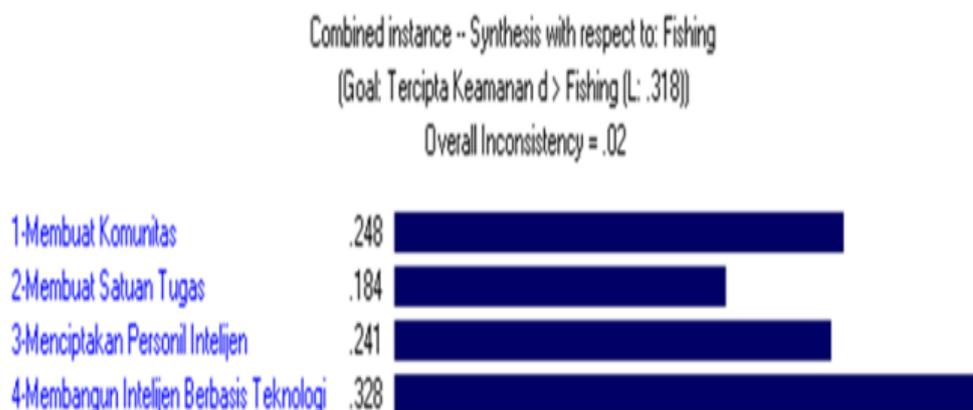
Gambar 3: Bobot Prioritas Alternatif Terhadap Kriteria Garyar.

Hasil pengolahan data dari bobot prioritas alternatif terhadap kriteria Garyar yaitu yaitu (1) Membuat Komunitas 0,18; (2) Membuat Satuan Tugas 0,21; (3) Menciptakan Personil Intelijen 0.28; (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0,32. Hasil bobot prioritas tertinggi pada alternatif ke (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0.32 dan ratio konsistensi 0,01.



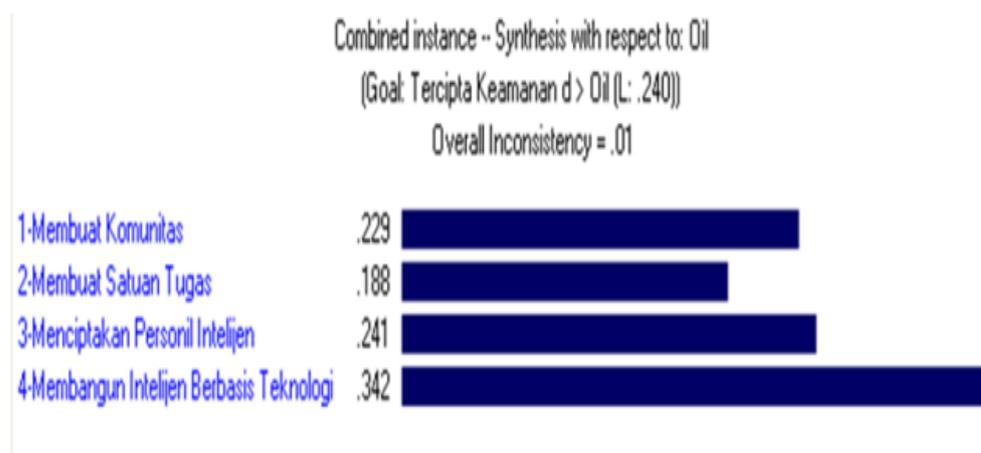
Gambar 4: Bobot Prioritas Terhadap Alternatif *Illegal Trading*.

Hasil pengolahan data dari bobot prioritas alternatif terhadap kriteria Trading yaitu yaitu (1) Membuat Komunitas 0,22; (2) Membuat Satuan Tugas 0,19; (3) Menciptakan Personil Intelijen 0.24; (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0,33. Hasil bobot prioritas tertinggi pada alternatif ke (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0.33 dan ratio konsistensi 0,03.



Gambar 5: Bobot Prioritas Terhadap Alternatif *Illegal Fishing*.

Hasil pengolahan data dari bobot prioritas alternatif terhadap kriteria Fishing yaitu yaitu (1) Membuat Komunitas 0,24; (2) Membuat Satuan Tugas 0,18; (3) Menciptakan Personil Intelijen 0.24; (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0,32. Hasil bobot prioritas tertinggi pada alternatif ke (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0.32 dan ratio konsistensi 0,02.



Gambar 6: Bobot Prioritas Terhadap Alternatif *Illegal Oil*

Hasil pengolahan data dari bobot prioritas alternatif terhadap kriteria Oil yaitu yaitu (1) Membuat Komunitas 0,22; (2) Membuat

Satuan Tugas 0,18; (3) Menciptakan Personil Intelijen 0.24; (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0,34. Hasil bobot prioritas tertinggi pada alternatif ke (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0.34 dan ratio konsistensi 0,01.

3.3. Uji Konsistensi

Pengukuran konsistensi berdasarkan atas nilai eigenvalue maksimum. Jika akan diukur tingkat konsistensi untuk keseluruhan level, maka digunakan *Consistency Ratio* (CR) yang merupakan rasio antara CI dengan angka random indeks konsistensi. Penilaian dikatakan konsisten jika $CR \leq 0.1$

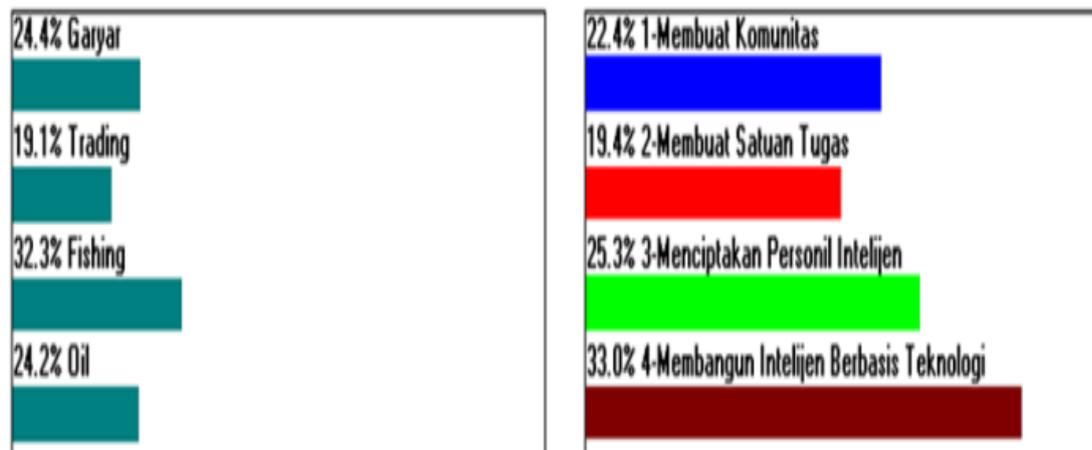
Tabel 4.7.
Konsistensi

PERBANDINGAN PERPASANGAN	CONSISTENCY RATIO
Alternatif dengan Goal	0.01
Kriteria Garyar dengan Sub Kriteria	0.00
Kriteria Trading dengan Sub Kriteria	0.05
Kriteria Fishing dengan Sub Kriteria	0.01
Kriteria Oil dengan Sub Kriteria	0.00

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel konsistensi menunjuk nilai dibawah 10% sehingga dikatakan penilaian konsisten dan hasil dapat diterima.

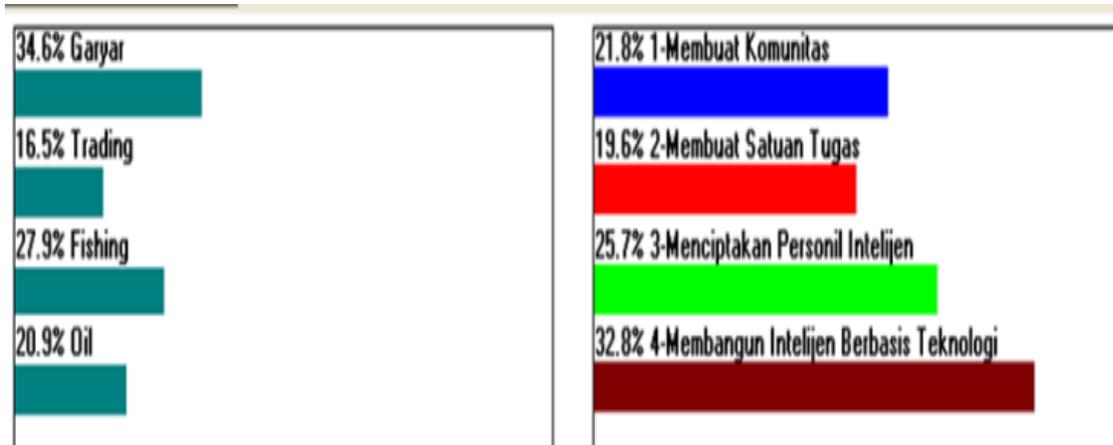
3.4. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dapat dilihat kriteria atau elemen dari struktur hirarki yang paling sensitif terhadap perubahan. Untuk melihat tingkat sensitivitas perubahan prioritas dilakukan simulasi dengan menaikkan bobot masing-masing kriteria dengan asumsi terdapat kenaikan pendapat responden dimasa mendatang dari masing-masing kriteria.



Gambar 8: Sensitivitas Skala Prioritas Alternatif terhadap Kriteria Saat ini

Kondisi awal pendapat para responden menunjukkan bahwa skala prioritas secara berturut dari yang prioritas utama hingga prioritas akhir adalah (0.33) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi; (0.25) Menciptakan Personil Intelijen; (0.22) Membuat Komunitas; dan (0.19) Membuat Satuan Tugas. Jika diasumsikan di masa depan terjadi peningkatan penilaian kewenangan (kriteria) Garyar sebesar 10% dari 24.4% menjadi 34.6%.



Gambar 9 : Perubahan Sensitivitas

Jika dilakukan simulasi pada kriteria Garyar dengan menaikkan bobot 10% maka alternatif membangun intelijen berbasis teknologi dari 0.33 menjadi 0.28. Berdasarkan hasil analisis simulasi tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa perubahan bobot kriteria hingga kenaikan atau penurunan 10% ternyata tidak merubah urutan prioritas alternatif yaitu membangun intelijen berbasis teknologi, kemudian menciptakan personil intelijen dan membuat komunitas serta membuat satuan tugas.

3.5. Analisis Hasil AHP

Berdasarkan analisis data dengan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) dan Wawancara yang diolah dengan *software expert choice* 11 dalam menganalisis prioritas kriteria dan alternatif adalah:

- a. Membuat Komunitas 0,22;
- b. Membuat Satuan Tugas 0,19;
- c. Menciptakan Personil Intelijen 0.25;
- d. Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0,32;
- e. Hasil bobot prioritas tertinggi pada alternatif Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0.32 dan ratio konsistensi 0,01. Proses bisnis internal menjadi prioritas utama, hasil ini relevan dengan asumsi pengambil keputusan yang menilai membangun intelijen berbasis teknologi merupakan kunci keberhasilan organisasi.

Hasil menunjukkan responden ahli menitikberatkan pada pembangunan intelijen yang berbasis teknologi sebagai strategi penting. Pembangunan intelijen berbasis teknologi merupakan strategi penting pada setiap kewenangan yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Dalam meningkatkan peranan intelijen TNI Angkatan Laut diharapkan membangun intelijen berbasis teknologi sebagai prioritas utama dan lebih unggul daripada 3 alternatif strategi lainnya.

Para ahli atau *expert* memberikan tanggapan bahwa intelijen diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dalam rangka mendukung operasi. Kemampuan deteksi, mencegah dan menangkal diperoleh dari alternatif yang telah ditetapkan yaitu pengembangan teknologi informasi menjadi prioritas tertinggi. Namun tidak menutup kemungkinan alternatif lainnya seperti pembentukan personil intelijen, pembentukan komunitas dan pembentukan satuan tugas. Kegiatan intelijen dapat dilaksanakan menggunakan *Eletronic Intelligent*, *Imagery Intelligent* dan *Signal Intelligent* namun tidak luput keberhasilan dari *Human Intelligent*. Kemampuan *Human Intelligent* merupakan garda terakhir kekuatan yang mampu menilai dan analisa dari hasil deteksi.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Wawancara dan penentuan prioritas menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat disimpulkan bahwa kebutuhan utama intelijen TNI Angkatan Laut guna memaksimalkan perannya dalam memberantas tindak pidana dilaut adalah membangun/mengembangkan dan memaksimalkan fungsi intelijen berbasis teknologi yang mutakhir dan inovatif.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat saran yang diberikan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait peran dan fungsi Intelijen TNI Angkatan Laut dalam pemberantasan tindak pidana di laut.
- b. Bagi TNI Angkatan Laut, Pembangunan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dalam rangka mengembangkan sistem informasi pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang mandiri maupun terintegrasi dengan berbasis sistem peringatan dini. Dan Peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan laut yang berbasis sistem peringatan dini, sebagai berikut: sarana dan prasarana utama operasi laut Kapal TNI AL (KRI), sarana dan prasarana surveilliance/deteksi dini (radar jarak jauh, AIS/AISSAT dan peralatan komunikasi). Serta peningkatan kapasitas personil intelijen TNI Angkatan Laut yang kapabel, profesional, dan menguasai teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Chin, W.C. dan Todd, P.A. 1995. *On the Use, Usefulness and Ease of Use of Structural Equation Modelling in MIS Research: A Note of Caution. MIS Quarterly*.

Irawan, Sukarno. 2004. *Ancaman Potensial dan Strategi Penangkalan*, Jakarta: Widyaiswara Luar Biasa Utama Ka-BIN.

Johnson, och K. 2002. *Bombs, Bugs, Drugs and Thugs: Intelligence and America's quest for security*. New York: New York University Press.

Moleong, L.J. 2010. *Metode Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Muhammad AS Hikam. 2014. *Menyongsong 2014-2019*. Jakarta : BIN.

Saronto, Y. Wahyu dkk. 2004. *Intelijen : Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. PT. Ekalaya Saputra.

Thomas L. Saaty. 1986 *Decision Making for Leaders, The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas *Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia*.

Keputusan Kasal Nomor KEP/1111/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe.

Komando Pendidikan Operasi Laut Pusat Pendidikan Intelijen Maritim

Naskah Sementara Buku Petunjuk Operasi Intelijen Maritim

Artikel Jurnal

Sayidiman Suryohadiprojo, *Kemaritiman Indonesia*,
(<http://sayidiman.suryohadiprojo.com>. Di akses pada 15 Maret 2019).